

The Effect Of Transparency, Accountability, And Siskeudes On The Management Of Village Financial Reports In Buntu Bedimbar Village, Tanjung Morawa District, Deli Serdang Regency

Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Siskeudes Terhadap Pengelolaan Laporan Keuangan Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang

Jelita Br Simangunsong¹⁾; Galih Supraja²⁾

^{1,2)} Program Studi Akuntansi, Fakultas Sosial Sains, Universitas Panca Budi Medan

Email: ¹⁾ jelitasimangunsong1769@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [28 Juli 2026]
Revised [19 Oktober 2026]
Accepted [20 Oktober 2026]

KEYWORDS

*Accountability; Transparency;
Village Financial System
(Siskeudes).*

**This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license**

ABSTRAK

Pengelolaan laporan keuangan desa yang berkualitas memerlukan tata kelola yang terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan didukung sistem informasi yang memadai. Studi ini bertujuan menganalisis pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap pengelolaan laporan keuangan Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Pendekatan kuantitatif asosiatif kausal digunakan terhadap 45 aparatur dan unsur kelembagaan desa melalui sampling jenuh. Data dikumpulkan dengan kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan regresi linier berganda pada SPSS 22. Hasil menunjukkan transparansi ($p=0,138$) dan akuntabilitas ($p=0,428$) tidak berpengaruh signifikan secara parsial, sedangkan Siskeudes berpengaruh positif dan signifikan ($B=0,824$; $p<0,001$). Secara simultan ketiga variabel berpengaruh signifikan ($F=28,717$; $p<0,001$) dengan Adjusted R^2 0,654. Temuan menegaskan peran dominan optimalisasi Siskeudes dalam meningkatkan pengelolaan laporan keuangan desa.

ABSTRACT

High-quality village financial reporting requires open governance, clear accountability, and adequate information-system support. This study analyzes the effects of transparency, accountability, and the Village Financial System (Siskeudes) on financial report management in Buntu Bedimbar Village, Tanjung Morawa District, Deli Serdang Regency. A causal-associative quantitative design was applied to 45 village officials and institutional members using total sampling. Data were collected through questionnaires, interviews, observation, and documentation and analyzed by multiple linear regression using SPSS 22. The results show that transparency ($p=0.138$) and accountability ($p=0.428$) have no significant partial effect, whereas Siskeudes has a positive and significant effect ($B=0.824$; $p<0.001$). Jointly, the three variables significantly affect village financial report management ($F=28.717$; $p<0.001$), with an Adjusted R^2 of 0.654. The findings underline the dominant role of optimizing Siskeudes while transparency and accountability remain important governance principles that require continuous strengthening.

PENDAHULUAN

Pengelolaan laporan keuangan desa merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan karena menjadi sarana untuk merekam, menyajikan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik. Laporan yang tertib dan dapat dipercaya dibutuhkan tidak hanya untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga untuk mendukung perencanaan pembangunan, evaluasi program, pengawasan, dan pengambilan keputusan di tingkat desa. Dalam konteks dana yang bersumber dari APBN dan APBD, tuntutan efektivitas, efisiensi, ekonomis, transparansi, serta pertanggungjawaban menjadi semakin penting. Susanto (2021) menempatkan keterbukaan informasi, administrasi yang terstruktur, dan kemampuan aparatur sebagai faktor yang berkaitan dengan pengelolaan laporan keuangan desa.

Transparansi menjadi salah satu prinsip dasar karena memberi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai rencana, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keterbukaan tersebut diharapkan mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah desa dan masyarakat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik. Mardiasmo (2018) menegaskan bahwa transparansi merupakan unsur tata kelola sektor publik yang mendorong keterbukaan atas pengelolaan sumber daya. Dalam praktik pemerintahan desa, transparansi tidak cukup dipahami sebagai publikasi informasi semata, tetapi juga berkaitan dengan kemudahan akses, kelengkapan informasi, dan ketepatan waktu penyampaiannya.

Akuntabilitas melengkapi transparansi melalui kewajiban aparatur desa untuk mempertanggungjawabkan proses dan hasil pengelolaan keuangan sesuai ketentuan. Halim dan Kusufi (2019) menempatkan akuntabilitas sektor publik sebagai dasar penyusunan informasi keuangan yang

relevan dan dapat diandalkan. Pada tingkat desa, akuntabilitas mencakup ketertiban pencatatan, kepatuhan terhadap aturan, penyusunan laporan, dan kemampuan menjelaskan penggunaan anggaran kepada pihak yang berkepentingan. Namun, penerapan akuntabilitas dapat menghadapi kendala berupa keterbatasan kompetensi aparatur, kurangnya pelatihan teknis, serta belum seragamnya kemampuan mengelola administrasi keuangan.

Penggunaan teknologi informasi melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) menjadi dimensi lain yang semakin penting. Sistem ini dikembangkan untuk membantu proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan desa agar lebih tertib, efisien, transparan, dan akuntabel (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan [BPKP], 2023). Integrasi proses dalam satu aplikasi memungkinkan pencatatan lebih sistematis dan mendukung pengawasan atas transaksi. Pada saat yang sama, efektivitas pemanfaatannya bergantung pada kemampuan pengguna, ketersediaan sarana, pendampingan, dan pemanfaatan fitur aplikasi secara konsisten.

Fenomena empiris di Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang memperlihatkan masih adanya selisih antara anggaran dan realisasi pendapatan maupun belanja selama 2020-2024. Selisih pendapatan berkurang dari Rp81.079.484 pada 2020 menjadi Rp4.667.730 pada 2024, sedangkan selisih belanja yang sempat menurun hingga Rp52.115.118 pada 2023 kembali menjadi Rp73.115.118 pada 2024. Selisih tersebut tidak serta-merta menunjukkan penyimpangan, tetapi dapat menjadi indikasi bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, pencairan, administrasi, dan pertanggungjawaban anggaran masih memerlukan penguatan. Hasil pra-survei juga menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap informasi pemanfaatan dana desa belum sepenuhnya optimal dan penggunaan Siskeudes masih dipengaruhi perbedaan kemampuan aparatur.

Tabel 1. Laporan Realisasi APB Desa Buntu Bedimbar Tahun 2020-2024

Tahun	Pendapatan Anggaran (Rp)	Pendapatan Realisasi (Rp)	Selisih Pendapatan (Rp)	Belanja Anggaran (Rp)	Belanja Realisasi (Rp)	Selisih Belanja (Rp)
2020	1.807.139.581	1.726.060.097	81.079.484	1.798.726.919	1.664.611.801	134.115.118
2021	1.702.222.800	1.635.455.070	66.767.730	1.601.726.919	1.506.611.801	95.115.118
2022	1.599.022.800	1.533.355.070	65.667.730	1.551.726.919	1.483.611.801	68.115.118
2023	1.092.022.800	1.057.355.070	34.667.730	1.066.726.919	1.014.611.801	52.115.118
2024	1.053.022.800	1.048.355.070	4.667.730	1.000.726.919	927.611.801	73.115.118

Sumber: Laporan Realisasi APB Desa Buntu Bedimbar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2024.

Data tersebut menguatkan urgensi untuk menilai faktor-faktor yang berkaitan dengan pengelolaan laporan keuangan desa. Studi terdahulu belum menunjukkan pola temuan yang sepenuhnya konsisten. Rahmawati (2023) mengemukakan pengaruh positif transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan Sari dan Nugroho (2024) menekankan peran akuntabilitas dalam ketertiban administrasi. Di sisi lain, kajian yang dirangkum dalam sumber penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas tidak selalu menghasilkan pengaruh langsung ketika kompetensi aparatur, pengendalian internal, budaya organisasi, dan pemanfaatan teknologi belum memadai. Sebagian besar kajian mengenai Siskeudes justru menempatkan sistem tersebut sebagai sarana yang dapat meningkatkan ketepatan pencatatan, efektivitas pelaporan, dan kemudahan pengawasan.

Research gap penelitian ini terletak pada dua aspek. Pertama, terdapat gap empiris berupa inkonsistensi pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kualitas pengelolaan keuangan desa. Kedua, terdapat gap kontekstual karena karakteristik Desa Buntu Bedimbar berbeda dari lokasi penelitian terdahulu, sementara desa ini telah menggunakan Siskeudes dan tetap menghadapi selisih anggaran-realisasi serta keterbatasan akses informasi. Karena itu, pengujian ketiga variabel dalam satu model pada lokasi tersebut diperlukan untuk memperoleh bukti empiris yang lebih kontekstual.

Kebaruan penelitian diarahkan pada penilaian simultan antara prinsip tata kelola berupa transparansi dan akuntabilitas dengan dukungan teknologi berupa Siskeudes dalam menjelaskan pengelolaan laporan keuangan desa. Perspektif ini memungkinkan pengujian apakah kualitas pengelolaan lebih ditentukan oleh prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban, oleh sistem informasi, atau oleh kombinasi ketiganya. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh parsial dan simultan transparansi, akuntabilitas, serta Siskeudes terhadap pengelolaan laporan keuangan Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang.

LANDASAN TEORI

Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi menjelaskan hubungan antara principal sebagai pihak pemberi mandat dan agent sebagai pihak yang menerima mandat untuk mengelola sumber daya serta mempertanggungjawabkan hasilnya (Jensen & Meckling, 1976). Dalam pemerintahan desa, masyarakat dapat diposisikan sebagai principal dan pemerintah desa sebagai agent. Hubungan tersebut berpotensi menimbulkan asimetri informasi ketika masyarakat tidak memiliki akses yang setara terhadap informasi pengelolaan sumber daya publik. Karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan sistem pencatatan yang terdokumentasi menjadi mekanisme penting untuk memperkecil kesenjangan informasi.

Ririhena dan Richard (2022) menekankan relevansi relasi agensi dan akuntabilitas dalam penciptaan nilai publik pemerintah daerah. Dalam konteks keuangan desa, transparansi menyediakan akses informasi, akuntabilitas membentuk mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan Siskeudes mendukung pencatatan dan pelaporan secara lebih terstruktur. Cahyani et al. (2022) juga menempatkan transparansi, akuntabilitas, kompetensi aparatur, dan pengendalian internal sebagai unsur yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, teori agensi memberikan dasar untuk memahami mengapa ketiga variabel penelitian diperkirakan berhubungan dengan kualitas pengelolaan laporan keuangan.

Pengelolaan Laporan Keuangan Desa

Pengelolaan laporan keuangan desa mencakup pencatatan, penyusunan, pelaporan, dan pertanggungjawaban transaksi keuangan secara sistematis sesuai ketentuan. Suliyatini et al. (2025) memandang pengelolaan laporan keuangan desa sebagai wujud tanggung jawab pemerintah desa dalam menghasilkan laporan yang berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ketepatan laporan, keakuratan data, dan ketepatan waktu pelaporan. Ketiga indikator tersebut mewakili kualitas proses penyajian informasi keuangan yang dibutuhkan untuk evaluasi dan pengawasan.

Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah desa dalam menyediakan informasi pengelolaan keuangan secara jelas, mudah diakses, dan tepat waktu. Ibrahim et al. (2024) menempatkan transparansi sebagai sarana untuk membuka akses informasi kepada masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik. Dalam perspektif agensi, transparansi berfungsi mengurangi asimetri informasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Indikator transparansi dalam penelitian ini mencakup keterbukaan informasi finansial, kemudahan akses informasi, dan ketepatan waktu publikasi laporan.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan sesuai aturan dan pedoman. Alfiani dan Estiningrum (2021) mengaitkan akuntabilitas dengan kemampuan pemerintah desa menyusun serta menyampaikan laporan secara tertib dan memadai untuk dipertanggungjawabkan. Indikator yang digunakan meliputi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, dan penyampaian laporan keuangan. Secara konseptual, peningkatan akuntabilitas diharapkan memperbaiki ketertiban administrasi dan kualitas informasi keuangan.

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Siskeudes merupakan aplikasi yang mendukung pengelolaan keuangan desa melalui proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan yang terintegrasi (BPKP, 2023). Winarti et al. (2026) membahas akuntabilitas laporan keuangan desa dengan menempatkan implementasi Siskeudes, kompetensi aparatur, dan transparansi sebagai faktor empiris yang relevan. Dalam penelitian ini, Siskeudes dipahami sebagai pemanfaatan teknologi informasi yang dapat mempercepat pencatatan, meningkatkan ketepatan data, mengurangi kesalahan administrasi, dan mempercepat penyusunan laporan. Indikator yang digunakan ialah kemudahan penggunaan, ketepatan data, dan kecepatan penyusunan laporan.

Penelitian Terdahulu dan Kesenjangan Empiris

Alfiani dan Estiningrum (2021) membahas akuntabilitas, transparansi, dan sistem akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, sedangkan Cahyani et al. (2022) memperluas kerangka dengan kompetensi aparatur dan pengendalian internal. Kedua kajian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa dipengaruhi kombinasi prinsip tata kelola dan kapasitas organisasi, sehingga pengujian satu variabel secara terpisah tidak selalu cukup.

Kajian terkait transparansi dan akuntabilitas juga dilakukan oleh Rahmawati (2023), Pratiwi et al. (2024), Ibrahim et al. (2024), Armaida et al. (2024), Wardah dan Horri (2025), serta Sipahutar et al. (2025). Fokus penelitian-penelitian tersebut berada pada pengelolaan dana desa, kualitas laporan keuangan, dan keterbukaan informasi publik. Sumber penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan hasil antar-lokasi, terutama mengenai apakah transparansi dan akuntabilitas berpengaruh langsung terhadap kualitas pengelolaan laporan keuangan.

Dimensi sistem informasi ditelaah oleh Putri (2024), Susano dan Rachmawati (2024), serta Winarti et al. (2026) melalui pembahasan penerapan Siskeudes pada efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Ananda et al. (2025) menambahkan partisipasi sebagai variabel yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa, sementara Supraja (2019) menunjukkan pentingnya standar akuntansi pemerintahan dan fungsi pengawasan dalam konteks kinerja keuangan pemerintah daerah. Peta penelitian tersebut memperlihatkan bahwa sistem, pengawasan, partisipasi, dan kapasitas aparatur dapat menjadi konteks penting ketika pengaruh transparansi atau akuntabilitas tidak muncul secara langsung.

Berdasarkan rangkaian studi terdahulu, posisi penelitian ini adalah menguji transparansi, akuntabilitas, dan Siskeudes secara bersamaan pada Desa Buntu Bedimbar. Perbedaan lokasi, karakteristik aparatur, akses informasi, serta tingkat pemanfaatan aplikasi menjadi alasan penting untuk menguji kembali hubungan yang sebelumnya menghasilkan temuan tidak seragam. Dengan demikian, penelitian tidak sekadar mengulang pengujian terdahulu, tetapi menempatkan prinsip governance dan dukungan teknologi dalam satu model empiris yang sama.

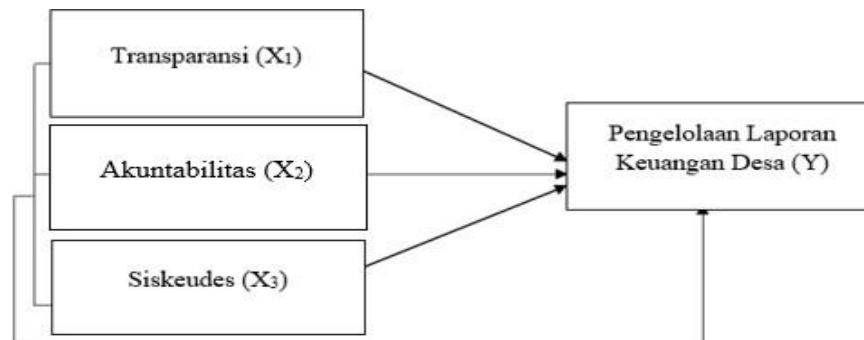
Tabel 2. Pemetaan Penelitian Terdahulu yang Relevan

Peneliti	Fokus Kajian	Relevansi terhadap Penelitian
Alfiani & Estiningrum (2021)	Akuntabilitas, transparansi, dan sistem akuntabilitas keuangan desa	Mendukung pengujian variabel transparansi dan akuntabilitas.
Cahyani et al. (2022)	Akuntabilitas, transparansi, kompetensi aparatur, dan pengendalian internal	Menunjukkan konteks tata kelola yang lebih luas di luar tiga variabel utama.
Rahmawati (2023)	Transparansi dan pengelolaan keuangan desa	Menjadi pembanding langsung untuk pengaruh transparansi.
Pratiwi et al. (2024)	Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa	Memperkuat konteks governance pada pengelolaan keuangan desa.
Ibrahim et al. (2024)	Akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan	Relevan dengan kualitas keluaran pelaporan keuangan.
Putri (2024)	Penerapan Siskeudes dan efektivitas pengelolaan laporan keuangan	Menjadi pembanding langsung hubungan Siskeudes dan pengelolaan laporan.
Susano & Rachmawati (2024)	Transparansi dan akuntabilitas keuangan desa melalui Siskeudes	Menghubungkan prinsip tata kelola dengan sistem informasi desa.
Ananda et al. (2025)	Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi pada pengelolaan dana desa	Menunjukkan adanya faktor partisipasi di luar model penelitian.
Wardah & Horri (2025)	Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan dana desa	Memberi pembanding kontekstual mengenai pelaporan dana desa.
Winarti et al. (2026)	Siskeudes, kompetensi aparatur, transparansi, dan akuntabilitas laporan	Paling dekat dengan integrasi teknologi, kompetensi, dan governance.

Sumber: Diringkas dari referensi yang digunakan dalam penelitian.

Kerangka Konseptual dan Hipotesis

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian



Sumber: Diolah dari model penelitian, 2026.

1. H1: Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan laporan keuangan Desa Buntu Bedimbar.
2. H2: Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan laporan keuangan Desa Buntu Bedimbar.
3. H3: Siskeudes berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan laporan keuangan Desa Buntu Bedimbar.
4. H4: Transparansi, akuntabilitas, dan Siskeudes secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan laporan keuangan Desa Buntu Bedimbar.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal untuk menguji hubungan sebab-akibat antara transparansi, akuntabilitas, serta Siskeudes sebagai variabel independen dan pengelolaan laporan keuangan desa sebagai variabel dependen. Pemilihan desain didasarkan pada tujuan penelitian yang menguji arah dan signifikansi pengaruh antarvariabel secara empiris. Pendekatan kuantitatif memungkinkan data jawaban responden dianalisis menggunakan prosedur statistik untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan (Sugiyono, 2021).

Populasi penelitian berjumlah 45 orang yang terdiri atas aparatur dan unsur kelembagaan Desa Buntu Bedimbar yang terlibat langsung dalam pengelolaan, pelaksanaan, pengawasan, atau pelaporan keuangan desa. Cakupan populasi meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, perangkat urusan dan seksi, operator Siskeudes, Bendahara Desa, staf administrasi, kepala dusun, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa. Karena jumlah populasi relatif terbatas dan seluruh unsur memiliki keterkaitan dengan proses pengelolaan keuangan, teknik sampling jenuh atau total sampling digunakan sehingga seluruh 45 anggota populasi menjadi responden.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner, wawancara, dan observasi langsung, sedangkan data sekunder bersumber dari laporan keuangan desa, profil desa, dokumentasi Siskeudes, serta literatur yang relevan. Instrumen kuesioner memuat masing-masing tiga butir untuk transparansi, akuntabilitas, Siskeudes, dan pengelolaan laporan keuangan desa. Transparansi diukur melalui keterbukaan, aksesibilitas, dan ketepatan waktu informasi; akuntabilitas melalui pertanggungjawaban, kepatuhan, dan penyampaian laporan; Siskeudes melalui kemudahan penggunaan, ketepatan data, dan kecepatan penyusunan laporan; sedangkan variabel dependen diukur melalui ketepatan laporan, akurasi data, dan ketepatan waktu pelaporan.

Analisis data dilakukan menggunakan SPSS versi 22. Tahapan analisis mencakup uji validitas melalui corrected item-total correlation, uji reliabilitas dengan Cronbach's Alpha, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji parsial (t), uji simultan (F), serta koefisien determinasi. Normalitas residual diperiksa melalui histogram, P-P Plot, dan One-Sample Kolmogorov-Smirnov; multikolinearitas dinilai menggunakan tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF); sedangkan heteroskedastisitas diperiksa melalui pola scatterplot. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5%. Model regresi dirumuskan sebagai $Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \epsilon$, dengan Y sebagai pengelolaan laporan keuangan desa, X1 transparansi, X2 akuntabilitas, dan X3 Siskeudes. Adjusted R² digunakan untuk menilai kemampuan model menjelaskan variasi variabel dependen dengan mempertimbangkan jumlah variabel independen (Ghozali, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji Kualitas Instrumen dan Asumsi Model

Seluruh item kuesioner memenuhi kriteria validitas karena corrected item-total correlation berada di atas r tabel 0,294. Rentang korelasi item untuk transparansi adalah 0,376-0,523; akuntabilitas 0,474-0,880; Siskeudes 0,662-0,773; dan pengelolaan laporan keuangan desa 0,550-0,739. Reliabilitas juga terpenuhi karena Cronbach's Alpha seluruh variabel lebih besar dari 0,60, yaitu 0,658 untuk transparansi, 0,665 untuk akuntabilitas, 0,851 untuk Siskeudes, dan 0,764 untuk pengelolaan laporan keuangan desa. Dengan demikian, instrumen memiliki konsistensi internal yang memadai untuk analisis lanjutan.

Tabel 3. Ringkasan Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Rentang Corrected Item-Total Correlation	r Tabel	Cronbach's Alpha	Kesimpulan
Transparansi (X1)	0,376-0,523	0,294	0,658	Valid dan reliabel
Akuntabilitas (X2)	0,474-0,880	0,294	0,665	Valid dan reliabel
Siskeudes (X3)	0,662-0,773	0,294	0,851	Valid dan reliabel
Pengelolaan Laporan Keuangan Desa (Y)	0,550-0,739	0,294	0,764	Valid dan reliabel

Sumber: Data diolah dengan SPSS 22, 2026.

Hasil uji normalitas memperlihatkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) One-Sample Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,200, lebih besar dari 0,05, sehingga residual memenuhi asumsi normalitas. Pola histogram membentuk kurva mendekati lonceng dan titik pada P-P Plot mengikuti garis diagonal. Uji multikolinearitas menunjukkan tolerance transparansi, akuntabilitas, dan Siskeudes masing-masing 0,571; 0,501; dan 0,507, seluruhnya di atas 0,10. Nilai VIF masing-masing 1,751; 1,994; dan 1,974, seluruhnya di bawah 5. Scatterplot residual juga tidak membentuk pola tertentu dan titik tersebar di atas serta di bawah sumbu nol. Rangkaian hasil tersebut menunjukkan model tidak menghadapi masalah normalitas, multikolinearitas, maupun heteroskedastisitas yang menghambat penggunaan regresi linier berganda.

Hasil Regresi Linier Berganda dan Uji Parsial

Tabel 4. Hasil Regresi Linier Berganda dan Uji Parsial

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
Konstanta	3,337	1,185	-	2,817	0,007	-	-
Transparansi	-0,172	0,114	-0,178	-1,514	0,138	0,571	1,751
Akuntabilitas	0,097	0,122	0,100	0,801	0,428	0,501	1,994
Siskeudes	0,824	0,121	0,851	6,832	0,000	0,507	1,974

Sumber: Data diolah dengan SPSS 22, 2026.

Persamaan regresi yang diperoleh adalah $Y = 3,337 - 0,172X_1 + 0,097X_2 + 0,824X_3 + \varepsilon$. Koefisien transparansi bernilai -0,172 dengan signifikansi 0,138, sehingga perubahan transparansi tidak terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan laporan keuangan desa ketika variabel lain dikendalikan. Koefisien akuntabilitas sebesar 0,097 dengan signifikansi 0,428 juga tidak signifikan. Sebaliknya, koefisien Siskeudes sebesar 0,824 dengan signifikansi 0,000 menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Nilai beta terstandar Siskeudes sebesar 0,851 merupakan yang paling besar dibandingkan variabel lain, sehingga Siskeudes menjadi variabel dominan dalam model.

Berdasarkan uji t, H1 ditolak karena transparansi memiliki t hitung -1,514 dan $p=0,138>0,05$. H2 juga ditolak karena akuntabilitas memiliki t hitung 0,801 dan $p=0,428>0,05$. H3 diterima karena Siskeudes memiliki t hitung 6,832 dan $p<0,001$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada konteks Desa Buntu Bedimbar, kualitas pengelolaan laporan keuangan lebih kuat berkaitan dengan efektivitas penggunaan sistem keuangan desa dibandingkan dengan variasi persepsi transparansi dan akuntabilitas secara parsial.

Uji Simultan dan Koefisien Determinasi

Tabel 5. Hasil Uji Simultan (ANOVA)

Sumber Variasi	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	165,322	3	55,107	28,717	0,000
Residual	78,678	41	1,919	-	-
Total	244,000	44	-	-	-

Sumber: Data diolah dengan SPSS 22, 2026.

Tabel 6. Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,823	0,678	0,654	1,38527

Sumber: Data diolah dengan SPSS 22, 2026.

Uji F menghasilkan F hitung 28,717 dengan $p < 0,001$ sehingga H4 diterima. Artinya, transparansi, akuntabilitas, dan Siskeudes secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan laporan keuangan desa. Nilai R sebesar 0,823 menunjukkan hubungan model yang kuat, sedangkan R Square 0,678 dan Adjusted R Square 0,654 menunjukkan bahwa 65,4% variasi pengelolaan laporan keuangan desa dapat dijelaskan oleh ketiga variabel setelah penyesuaian terhadap jumlah prediktor. Sisanya 34,6% berkaitan dengan faktor lain di luar model, seperti kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi yang lebih luas, atau pengawasan pemerintah sebagaimana diarahkan dalam bagian saran penelitian sumber.

Pembahasan

Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Laporan Keuangan Desa

Hasil parsial menunjukkan transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan laporan keuangan desa. Secara teoretis, temuan ini tidak sejalan dengan ekspektasi teori agensi yang menempatkan keterbukaan informasi sebagai mekanisme pengurangan asimetri antara agent dan principal. Namun, tidak signifikkannya pengaruh tidak berarti transparansi tidak penting. Temuan menunjukkan bahwa variasi transparansi yang diamati pada responden belum cukup menjelaskan perbedaan kualitas pengelolaan laporan keuangan ketika akuntabilitas dan Siskeudes dianalisis secara bersamaan.

Sumber penelitian mengaitkan kondisi tersebut dengan praktik transparansi yang masih dapat berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif, misalnya penyampaian informasi melalui papan informasi atau laporan pertanggungjawaban, tanpa selalu diikuti perbaikan proses pencatatan dan penyusunan laporan. Dalam situasi seperti ini, keterbukaan informasi dapat meningkatkan akses masyarakat tetapi belum otomatis meningkatkan ketepatan pencatatan, akurasi data, atau kecepatan penyusunan laporan. Pengelolaan laporan keuangan lebih membutuhkan kapasitas teknis dan sistem administrasi yang bekerja secara operasional.

Temuan berbeda dengan Ibrahim et al. (2024) dan Rahmawati (2023) yang dalam sumber penelitian ditempatkan sebagai rujukan mengenai kontribusi transparansi terhadap kualitas atau pengelolaan keuangan. Perbedaan tersebut dapat dipahami melalui karakteristik objek, tingkat partisipasi masyarakat, dan kualitas penerapan transparansi yang berbeda. Wardah dan Horri (2025), Pratiwi et al. (2024), dan Sipahutar et al. (2025) juga memperlihatkan bahwa transparansi lazim dibahas bersama akuntabilitas dalam konteks laporan keuangan publik, sehingga pengaruhnya perlu dibaca sebagai bagian dari sistem tata kelola yang lebih luas, bukan sebagai faktor yang selalu bekerja secara mandiri.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Laporan Keuangan Desa

Akuntabilitas memiliki koefisien positif tetapi tidak signifikan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan persepsi pertanggungjawaban, kepatuhan, dan penyampaian laporan belum terbukti secara statistik meningkatkan kualitas pengelolaan laporan keuangan pada sampel penelitian. Dalam kerangka agensi, akuntabilitas tetap berfungsi sebagai mekanisme pertanggungjawaban agent kepada principal, tetapi efektivitasnya bergantung pada bagaimana prosedur tersebut diterjemahkan ke dalam praktik administrasi dan kemampuan teknis aparatur.

Sumber penelitian menjelaskan bahwa akuntabilitas di tingkat desa dapat lebih banyak berorientasi pada pemenuhan kewajiban pelaporan kepada pemerintah daerah dan lembaga pengawas.

Jika pelaporan dipandang terutama sebagai kewajiban formal, peningkatan akuntabilitas persepsional belum tentu langsung mengubah ketepatan pencatatan atau kecepatan penyusunan laporan. Keterbatasan pelatihan, kemampuan aparatur, dan pemanfaatan teknologi juga dapat mengurangi dampak langsung akuntabilitas terhadap kualitas laporan.

Hasil ini tidak konsisten dengan Alfiani dan Estiningrum (2021) yang digunakan dalam sumber penelitian untuk menekankan peran akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Sari dan Nugroho (2024) juga ditempatkan sebagai rujukan yang menyoroti ketertiban administrasi melalui akuntabilitas. Perbedaan hasil menegaskan bahwa akuntabilitas bukan mekanisme yang berdiri sendiri; kontribusinya dapat bergantung pada kompetensi aparatur, pengendalian internal, dan sistem pengelolaan yang digunakan. Hal tersebut sejalan dengan ruang lingkup kajian Cahyani et al. (2022) yang memasukkan kompetensi dan pengendalian internal bersama prinsip tata kelola.

Pengaruh Siskeudes terhadap Pengelolaan Laporan Keuangan Desa

Siskeudes berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien 0,824 dan beta terstandar 0,851. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas pemanfaatan Siskeudes berkaitan kuat dengan peningkatan kualitas pengelolaan laporan keuangan desa. Sistem terintegrasi mendukung pencatatan transaksi, pengelolaan data, dan penyusunan laporan secara lebih sistematis, sehingga dapat memperbaiki ketepatan, kecepatan, dan konsistensi proses pelaporan.

Dari perspektif agensi, Siskeudes dapat dipahami sebagai mekanisme kontrol berbasis informasi yang membantu mengurangi ruang kesalahan administrasi dan memperkuat dokumentasi transaksi. Ketika proses keuangan terekam dalam sistem yang terstruktur, informasi lebih mudah ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Hal ini menjelaskan mengapa pengaruh Siskeudes tetap signifikan ketika transparansi dan akuntabilitas dikendalikan dalam model yang sama: sistem bekerja langsung pada proses operasional pengelolaan laporan, bukan hanya pada prinsip tata kelolanya.

Temuan tersebut sejalan dengan arah kajian Putri (2024), Susano dan Rachmawati (2024), serta Winarti et al. (2026) yang menempatkan Siskeudes sebagai unsur penting dalam efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. BPKP (2023) juga menegaskan fungsi Siskeudes untuk membantu pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, hasil penelitian memberikan bukti kontekstual bahwa optimalisasi teknologi informasi dapat menjadi penggerak langsung kualitas laporan ketika prinsip transparansi dan akuntabilitas belum memberikan pengaruh parsial yang signifikan.

Pengaruh Simultan dan Implikasi Temuan

Secara simultan, transparansi, akuntabilitas, dan Siskeudes berpengaruh signifikan dengan kemampuan penjelasan model sebesar 65,4%. Hasil ini penting karena menunjukkan bahwa ketidaksignifikanan transparansi dan akuntabilitas secara parsial tidak menghilangkan relevansi keduanya dalam kerangka pengelolaan yang terintegrasi. Transparansi menyediakan keterbukaan informasi, akuntabilitas menjaga pertanggungjawaban, dan Siskeudes menyediakan infrastruktur operasional yang mendukung pencatatan serta pelaporan. Ketiganya bekerja pada lapisan yang berbeda tetapi saling melengkapi. Temuan simultan relevan dengan Cahyani et al. (2022), yang membahas kombinasi akuntabilitas, transparansi, kompetensi aparatur, dan sistem pengendalian dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam konteks penelitian ini, Siskeudes muncul sebagai faktor dominan, tetapi penguatan sistem tanpa transparansi dan akuntabilitas berisiko menghasilkan administrasi yang tertib namun kurang terbuka atau kurang responsif terhadap kebutuhan pertanggungjawaban publik. Karena itu, implikasi praktisnya bukan menggantikan prinsip governance dengan teknologi, melainkan mengintegrasikan keduanya.

Kontribusi empiris penelitian terletak pada bukti bahwa pada Desa Buntu Bedimbar, dukungan sistem informasi memiliki pengaruh langsung yang lebih kuat daripada transparansi dan akuntabilitas secara parsial. Hasil ini memperkaya diskusi terdahulu yang tidak konsisten mengenai pengaruh prinsip tata kelola terhadap pengelolaan keuangan desa. Secara logis, kualitas laporan akan lebih mudah meningkat ketika aparatur memiliki mekanisme kerja yang secara langsung membantu input, pemrosesan, dan penyusunan laporan, sementara transparansi dan akuntabilitas berfungsi sebagai lingkungan tata kelola yang memastikan hasil sistem digunakan dan dipertanggungjawabkan secara tepat. Implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah perlunya peningkatan kompetensi operator dan aparatur melalui pelatihan teknis, pendampingan penggunaan aplikasi, serta pembaruan sistem secara berkala. Pada saat yang sama, pemerintah desa perlu memperluas akses informasi kepada masyarakat dan memastikan laporan tidak hanya tersedia, tetapi juga mudah dipahami dan disampaikan tepat waktu. Penguatan akuntabilitas perlu diarahkan dari sekadar pemenuhan administrasi menuju proses pertanggungjawaban yang mendukung kualitas data dan kepatuhan. Kombinasi tersebut lebih sesuai dengan hasil simultan penelitian dibandingkan pendekatan yang hanya menekankan satu aspek.

Keterkaitan Temuan dengan Fenomena Anggaran Desa

Data pra-survei APB Desa 2020-2024 menunjukkan bahwa selisih pendapatan cenderung menurun, tetapi selisih belanja masih berfluktuasi. Pada 2024, selisih pendapatan hanya Rp4.667.730, sedangkan selisih belanja sebesar Rp73.115.118. Pola ini memberi konteks bahwa pencapaian realisasi pendapatan dan pelaksanaan belanja tidak selalu bergerak secara sama. Dalam membaca hasil regresi, data anggaran tersebut berfungsi sebagai latar empiris mengenai kebutuhan perbaikan pengelolaan, bukan sebagai bukti bahwa selisih anggaran secara langsung disebabkan oleh transparansi, akuntabilitas, atau Siskeudes. Ketidaksignifikanan transparansi dan akuntabilitas secara parsial dapat dipahami dalam konteks perbedaan antara prinsip tata kelola dan proses operasional pelaporan. Keterbukaan informasi maupun kewajiban pertanggungjawaban dapat telah dijalankan, tetapi kualitas laporan tetap sangat bergantung pada ketepatan input, pengolahan data, konsistensi dokumen, dan kemampuan aparatur menyelesaikan proses administrasi. Dengan demikian, hasil penelitian mengarahkan perhatian pada kualitas implementasi, bukan sekadar keberadaan prinsip transparansi atau akuntabilitas.

Dominannya Siskeudes juga perlu diinterpretasikan secara proporsional. Koefisien positif dan signifikan menunjukkan hubungan statistik yang kuat dalam model penelitian, tetapi tidak berarti seluruh persoalan realisasi anggaran dapat diselesaikan hanya melalui aplikasi. Sumber penelitian menyebut keterlambatan penyaluran dana, perubahan kebijakan, kegiatan yang tidak terlaksana penuh, perubahan prioritas, serta kendala administratif sebagai kemungkinan penyebab selisih anggaran dan realisasi. Oleh sebab itu, optimalisasi Siskeudes perlu disertai perencanaan, pengawasan, kompetensi aparatur, dan koordinasi yang memadai.

Implikasi Teoretis dan Pengembangan Riset

Secara teoretis, hasil penelitian memberi nuansa pada penggunaan teori agensi dalam konteks pemerintahan desa. Transparansi dan akuntabilitas merupakan mekanisme yang secara konseptual mengurangi asimetri informasi dan memperkuat pertanggungjawaban, tetapi hasil parsial menunjukkan bahwa mekanisme tersebut tidak selalu menghasilkan perubahan langsung pada kualitas pengelolaan laporan. Signifikansi simultan model menunjukkan bahwa prinsip tata kelola lebih tepat dipahami bersama perangkat operasional yang membantu agent melaksanakan mandatnya secara terdokumentasi. Pola tersebut dapat dibandingkan dengan cakupan penelitian Kurniawan (2025) mengenai sistem akuntabilitas, Lestari (2023) mengenai transparansi dan akuntabilitas terhadap kualitas laporan, serta Syadeli (2021) mengenai determinan kinerja pengelolaan keuangan desa melalui transparansi. Ketiga rujukan memperlihatkan bahwa hubungan antara prinsip tata kelola dan keluaran keuangan dapat dipengaruhi oleh desain sistem serta konteks organisasi. Penelitian berikutnya dapat menguji model mediasi atau moderasi yang menempatkan kompetensi aparatur, pengendalian internal, atau pemanfaatan teknologi sebagai mekanisme yang menjelaskan kapan transparansi dan akuntabilitas menjadi lebih efektif.

Bagi pengembangan praktik, hasil penelitian menegaskan perlunya indikator evaluasi yang tidak berhenti pada ketersediaan dokumen atau publikasi informasi. Evaluasi transparansi dapat diarahkan pada aksesibilitas dan pemahaman masyarakat, sedangkan evaluasi akuntabilitas perlu melihat konsistensi antara bukti transaksi, kepatuhan prosedur, dan ketepatan laporan. Pada sisi teknologi, evaluasi Siskeudes perlu mencakup kemampuan pengguna, disiplin input, pemanfaatan fitur, dukungan teknis, dan kesinambungan pembaruan. Pendekatan evaluasi yang lebih menyeluruh dapat membantu menjelaskan mengapa suatu prinsip atau sistem berhasil pada satu desa tetapi tidak menunjukkan pengaruh yang sama pada desa lain.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian membuktikan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan laporan keuangan Desa Buntu Bedimbar dengan $p=0,138$, sedangkan akuntabilitas juga tidak berpengaruh signifikan dengan $p=0,428$. Siskeudes merupakan satu-satunya variabel yang berpengaruh positif dan signifikan secara parsial, dengan koefisien regresi 0,824 dan $p<0,001$, sehingga menjadi faktor dominan dalam model. Secara simultan, transparansi, akuntabilitas, dan Siskeudes berpengaruh signifikan dengan $F=28,717$ dan $p<0,001$. Adjusted R^2 sebesar 0,654 menunjukkan bahwa 65,4% variasi pengelolaan laporan keuangan desa dapat dijelaskan oleh ketiga variabel. Temuan tersebut menjawab tujuan penelitian dengan menunjukkan bahwa optimalisasi Siskeudes memiliki peran paling kuat dalam meningkatkan ketepatan dan efektivitas pengelolaan laporan, sementara transparansi dan akuntabilitas tetap perlu diperkuat sebagai prinsip tata kelola yang melengkapi dukungan sistem. Keterbatasan penelitian terletak pada cakupan satu desa, jumlah responden 45 orang, dan model yang hanya memuat tiga variabel sehingga generalisasi perlu dilakukan secara hati-hati.

Saran

Pemerintah Desa Buntu Bedimbar disarankan mengoptimalkan pemanfaatan Siskeudes melalui pelatihan berkelanjutan, pendampingan teknis, dan peningkatan kemampuan aparatur dalam menggunakan fitur aplikasi untuk pencatatan serta pelaporan. Transparansi perlu diperkuat melalui penyediaan informasi keuangan yang lengkap, mudah diakses, dan tepat waktu, sedangkan akuntabilitas perlu diarahkan pada kepatuhan yang disertai peningkatan kualitas proses pertanggungjawaban, bukan hanya pemenuhan dokumen. Penelitian selanjutnya dapat memperluas wilayah dan jumlah responden serta memasukkan variabel kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, atau pengawasan pemerintah agar kemampuan penjelasan model menjadi lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiani, A., & Estiningrum, S. D. (2021). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan sistem akuntabilitas keuangan desa dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akuntabilitas dan Keuangan Desa*, 5(2), 45-56.
- Ananda, F., Nasution, D. A. D., & Supraja, G. (2025). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa di Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 6(4), 6212-6225.
- Armada, S. G., Usdeldi, & Siregar, E. S. (2024). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap kualitas laporan keuangan desa. *Jurnal Ekonomi dan Pemerintahan Desa*, 8(1), 21-33.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2023). *Pedoman penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes)*. BPKP Republik Indonesia.
- Cahyani, C. Z., Basri, Y. M., & Kurnia, P. (2022). Accountability, transparency, competence of village apparatus, and internal control system in village financial management. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 7(1), 77-94.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2019). *Akuntabilitas sektor publik: Akuntabilitas keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Ibrahim, G., Blongkod, H., & Rasjid, H. (2024). Akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan (Studi pada desa-desa di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo). *Jurnal Akuntabilitas dan Audit Pemerintahan*, 6(1), 55-67.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Kurniawan, A. (2025). Penerapan sistem akuntabilitas dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmu Akuntabilitas Indonesia*, 10(1), 77-88.
- Lestari, N. A. (2023). Transparansi dan akuntabilitas dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah di Pemerintah Kota Sukabumi. *Jurnal Administrasi dan Keuangan Daerah*, 7(2), 101-112.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntabilitas sektor publik*. Andi Offset.
- Pratiwi, L., Nuraisyiah, & Masnawaty, S. (2024). Analisis transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Kebijakan Publik dan Akuntabilitas Desa*, 9(1), 12-25.
- Putri, D. A. (2024). Pengaruh penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) terhadap efektivitas pengelolaan laporan keuangan desa. *Jurnal Sistem Informasi Pemerintahan*, 5(3), 88-99.
- Rahmawati, S. (2023). Pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akuntabilitas Publik Indonesia*, 6(2), 65-74.
- Ririhena, S. W., & Richard, Y. F. (2022). Agency relations, accountability, and their relation to local government public value creation. *International Journal of Science and Society*, 4(3), 126-139.
- Sari, D., & Nugroho, A. (2024). Penerapan akuntabilitas desa dalam meningkatkan ketertiban administrasi keuangan desa. *Jurnal Akuntabilitas Pemerintahan*, 8(2), 40-53.
- Sipahutar, S. R., Fadilla, N., Nadapdap, R. H., Nabila, S., & Supraja, G. (2025). The effect of transparency and accountability on the quality of public financial reports. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan (EMAK)*, 6(2), 1-7.
- Sugiyono. (2021). *Metode riset kuantitatif, kualitatif dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Suliyatini, M., Dewata, E., & Satriawan, I. (2025). Transparansi, akuntabilitas dan pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akuntabilitas dan Tata Kelola Desa*, 11(1), 15-28.